



Journal of Community Service

Volume 6, Issue 1, June 2024

P-ISSN 2715-2901

E-ISSN 2715-291X

Open Access at: <https://idm.or.id/JCS/index.php/JCS>

NAVIGASI MENUJU INKLUSIVITAS: PENGABDIAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN AKSESIBILITAS TRANSPORTASI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS

NAVIGATION TOWARDS INCLUSIVITY: COMMUNITY SERVICE IN IMPROVING TRANSPORT ACCESSIBILITY FOR PERSONS WITH DISABILITIES

Septian Aryatama

Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun

Email: eptian@ppi.ac.id

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Inklusivitas,
Aksesibilitas
Transportasi,
Penyandang
Disabilitas.

ABSTRAK

Meningkatnya kebutuhan akan sistem transportasi yang inklusif telah menggarisbawahi pentingnya memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Kendala yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam menggunakan transportasi umum mencakup kurangnya fasilitas pendukung dan minimnya kesadaran masyarakat serta staf transportasi terhadap kebutuhan mereka. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut melalui serangkaian inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas dalam sistem transportasi. Penelitian ini menggunakan metode kolaboratif, melibatkan penyandang disabilitas, pengelola transportasi, dan pembuat kebijakan dalam proses pemetaan, perencanaan, dan implementasi solusi aksesibilitas. Survei, workshop, dan kampanye kesadaran diadakan sebagai bagian dari metodologi untuk mengumpulkan data dan meningkatkan kesadaran publik. Kesimpulan dari program ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif dan inklusif dapat signifikan meningkatkan aksesibilitas dalam transportasi untuk penyandang disabilitas. Melalui pengembangan dan implementasi solusi teknologi, seperti aplikasi navigasi ramah disabilitas, dan modifikasi infrastruktur fisik, seperti penambahan fasilitas pendukung aksesibilitas, sistem transportasi menjadi lebih dapat diakses. Edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat, bersama dengan pelatihan bagi staf transportasi, memainkan peran kunci dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Pembentukan jaringan dukungan antara penyandang disabilitas, masyarakat, dan penyedia layanan transportasi memperkuat inklusivitas dalam sistem transportasi. Program ini memberikan bukti bahwa melalui kerja sama yang erat antara semua pemangku kepentingan, inklusivitas dan aksesibilitas dalam transportasi umum untuk penyandang disabilitas dapat ditingkatkan secara signifikan.

Copyright © 2024 UJCS. All rights reserved.

ARTICLE INFO**Keywords:**

*Inclusivity,
Transportation
Accessibility, People
with Disabilities.*

ABSTRACT

The increasing need for inclusive transportation systems has underscored the importance of paying attention to accessibility for people with disabilities. Obstacles faced by people with disabilities in using public transportation include a lack of supporting facilities and minimal awareness of the public and transportation staff regarding their needs. This community service program aims to address this problem through a series of initiatives designed to increase accessibility and inclusivity in the transportation system. This research uses collaborative methods, involving people with disabilities, transportation managers, and policy makers in the process of mapping, planning, and implementing accessibility solutions. Surveys, workshops and awareness campaigns are conducted as part of the methodology to collect data and increase public awareness. The conclusions of this program show that a collaborative and inclusive approach can significantly improve accessibility in transportation for people with disabilities. Through the development and implementation of technological solutions, such as disability-friendly navigation applications, and modifications to physical infrastructure, such as the addition of accessibility support facilities, transportation systems become more accessible. Education and raising public awareness, along with training for transport staff, play a key role in creating a more inclusive environment. The establishment of a support network between people with disabilities, the community and transport service providers strengthens inclusivity in the transport system. This program provides evidence that through close collaboration between all stakeholders, inclusivity and accessibility in public transport for people with disabilities can be significantly improved.

Copyright © 2024 UJCS. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Dalam perjalanan menuju masyarakat yang inklusif, aksesibilitas merupakan salah satu pilar utama yang harus diperkuat, khususnya dalam sektor transportasi. Kebutuhan akan sistem transportasi yang ramah terhadap penyandang disabilitas menjadi semakin kritis mengingat mobilitas merupakan hak dasar setiap individu yang tidak terkecuali bagi mereka. Mobilitas yang efisien dan efektif memberikan akses ke berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan interaksi sosial, yang semuanya penting untuk pencapaian kualitas hidup yang lebih baik (Afkari & Maulana, 2021). Namun, realitas yang dihadapi oleh penyandang disabilitas sering kali jauh dari ideal. Banyak dari mereka yang mengalami kesulitan dalam mengakses transportasi umum akibat dari kurangnya fasilitas pendukung, seperti lift, ramp, atau bahkan informasi yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas sensorik. Hal ini tidak hanya menciptakan hambatan fisik tetapi juga hambatan psikologis, yang mana dapat menimbulkan perasaan isolasi dan ketergantungan yang tinggi pada orang lain (Almira & Aviandy, 2022).

Menghadapi kondisi tersebut, beberapa komunitas telah mengambil inisiatif melalui program pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengurangi gap aksesibilitas tersebut. Salah satu contohnya adalah pengembangan aplikasi navigasi khusus yang dirancang untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam menggunakan transportasi umum (Khotimah, 2023). Aplikasi ini tidak hanya memberikan informasi rute yang paling ramah disabilitas tetapi juga update real-time mengenai kondisi fasilitas pendukung di stasiun atau halte bus. Di sisi lain, ada pula

komunitas yang fokus pada modifikasi infrastruktur fisik. Mereka bekerja sama dengan pemerintah lokal dan penyedia layanan transportasi untuk menginstal fasilitas pendukung seperti ramp dan lift di stasiun-stasiun kereta atau terminal bus. Upaya ini juga dilengkapi dengan pelatihan bagi staf dan pengelola transportasi tentang cara melayani penyandang disabilitas dengan lebih baik (Rahayu & Swari, 2020).

Selain itu, kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas juga menjadi bagian penting dari upaya pengabdian ini. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam menggunakan transportasi umum diperlukan untuk membangun dukungan sosial yang lebih kuat. Dengan demikian, tidak hanya infrastruktur yang dibangun, tetapi juga empati dan sikap inklusif dalam masyarakat (Abdussamad et al., 2023). Namun, meskipun upaya-upaya tersebut telah memberikan dampak positif, masih banyak tantangan yang perlu diatasi. Keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun manusia, kerap menjadi hambatan dalam skala implementasi. Selain itu, koordinasi antar lembaga dan stakeholder yang terlibat masih perlu diperkuat untuk menciptakan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan (Sawir et al., 2023).

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa upaya menuju inklusivitas transportasi bagi penyandang disabilitas tidak hanya membutuhkan perubahan infrastruktur tetapi juga perubahan mindset dan kebijakan. Dalam konteks ini, pengabdian kepada masyarakat tidak hanya sebagai bentuk aksi sosial tetapi juga sebagai katalisator untuk transformasi sosial yang lebih inklusif.

TINJAUAN PUSTAKA

Aksesibilitas Transportasi

Keterbatasan dalam mengakses sistem transportasi publik menjadi penyebab bertambahnya jumlah kendaraan pribadi di mayoritas kota besar di Indonesia. Peningkatan kendaraan pribadi ini memberikan dampak tambahan pada beban jalan raya, yang berakibat pada tingkat keterjangkauan di sebuah area. Keterjangkauan adalah ukuran dari kepraktisan atau kemudahan dalam hal interaksi antar lokasi penggunaan lahan, serta seberapa gampang atau sulitnya mencapai lokasi tersebut melalui sistem transportasi (Herrindra et al., 2023).

Keterjangkauan merupakan konsep yang esensial dalam menghubungkan penggunaan lahan dengan transportasi. Dalam pengertian yang paling umum, keterjangkauan menunjukkan kemudahan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Konsep ini menyatukan pengaturan penggunaan lahan dari segi geografis dengan sistem transportasi yang menghubungkan antara satu dengan lainnya. Keterjangkauan mencakup ukuran kepraktisan atau kemudahan dalam cara interaksi lokasi penggunaan lahan satu dengan yang lain dan seberapa mudah atau sulitnya lokasi itu diakses lewat jaringan transportasi (Rakhmatulloh et al., 2022).

Keterjangkauan adalah ukuran kemungkinan atau kemudahan seseorang dalam mencapai destinasi perjalanannya. Ciri dari sistem transportasi dapat dilihat melalui keterjangkauannya. Keterjangkauan berdampak pada berbagai lokasi aktivitas atau penggunaan lahan. Selain itu, tempat aktivitas berpengaruh pada pola perjalanan yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Pola perjalanan ini selanjutnya

berpengaruh pada jaringan transportasi dan juga akan mempengaruhi keseluruhan sistem transportasi (Rosantiningsih & Yola, 2023).

Kemudahan akses bagi seseorang mungkin berbeda dengan orang lain, sehingga diperlukan pengukuran kinerja yang objektif untuk menentukan tingkat keterjangkauan atau kemudahan tersebut. Bagi pengguna transportasi umum, keterjangkauan bisa berarti kemudahan mencapai jalur transportasi umum dengan berjalan kaki, baik itu dari titik awal maupun titik akhir perjalanan, kemudahan mendapatkan transportasi umum, dan kemudahan perjalanan menuju destinasi menggunakan fasilitas transportasi umum (Putra & Putra, 2024). Umumnya, kota-kota besar memiliki densitas populasi yang tinggi. Hal ini bisa dilihat dari volume lalu lintas yang bergerak setiap hari di jalur-jalan utama kota, yang menyebabkan kemacetan, kebisingan, dan polusi udara. Perluasan kawasan perumahan ke pinggiran kota mengakibatkan bertambahnya jarak pergerakan menuju pusat kota, mengingat pusat kota masih menarik sebagai pusat aktivitas (Harimurti & Roychansyah, 2022).

Penyandang Disabilitas

Beragam pandangan mendeskripsikan Disabilitas sebagai suatu kondisi yang dihadapi oleh individu. Sebelumnya, kata cacat sering digunakan untuk mendeskripsikan individu dengan kebutuhan tertentu. Namun, dengan meningkatnya kesadaran serta pengertian mengenai kesamaan hak asasi manusia, penggunaan kata cacat mulai dianggap tidak lagi sesuai untuk merujuk kepada individu berkebutuhan khusus, dan digantikan dengan istilah orang dengan disabilitas. Ketika terminologi penyandang disabilitas diperkenalkan, istilah sebelumnya dianggap kurang menghormati dan menyenangkan, sehingga dilakukan perubahan dan koreksi (Haholongan & Subroto, 2021).

Disabilitas dapat diartikan sebagai kondisi atau situasi (seperti penyakit atau luka) yang merugikan atau membatasi kapasitas seseorang, baik dalam aspek mental maupun fisik. Disabilitas juga dipahami sebagai ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu seperti kebanyakan orang lainnya (Patel et al., 2020). Goldsmith mendefinisikan istilah penyandang disabilitas sebagai individu yang tidak dapat memanfaatkan fasilitas dan layanan suatu bangunan secara optimal akibat kurangnya dukungan fasilitas yang ada. Menurut Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD), penyandang disabilitas diidentifikasi sebagai individu yang mengalami gangguan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang, ketika berinteraksi dengan berbagai hambatan, dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan setara dalam masyarakat (Propiona, 2021).

Menurut Klasifikasi Internasional tentang Fungsi, Disabilitas, dan Kesehatan (ICF) oleh WHO, disabilitas dapat didefinisikan melalui tiga model, yaitu: (1) Gangguan (Impairment), (2) Disabilitas (Disability), dan (3) Hambatan (Handicap). (1) Gangguan diartikan dalam konteks kesehatan sebagai kondisi abnormalitas fisiologis, psikologis, atau struktural pada fungsi anatomi seseorang. (2) Disabilitas mengacu pada keterbatasan seseorang dalam melaksanakan fungsi atau aktivitas yang dianggap normal dan biasa oleh orang lain. Sedangkan (3) Hambatan diartikan sebagai kerugian yang dirasakan oleh seseorang akibat gangguan atau disabilitas yang membatasi mereka dalam memenuhi peran sebagai individu normal (Sodiqin, 2021). Marjuki mengklasifikasikan jenis-jenis disabilitas sebagai berikut:

1. Tuna Daksa, yang merujuk pada kondisi perbedaan fisik berupa luka, kerusakan, atau kelainan akibat tidak normalnya bentuk atau fungsi sendi, tulang, dan otot yang disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau kelainan bawaan (Maślanka et al., 2023).
2. Tuna Rungu, yang ditandai dengan penurunan kemampuan mendengar atau berbicara yang bisa disebabkan oleh kecelakaan, penyakit, atau kelainan sejak lahir (Muhaimin & Ishaq, 2023).
3. Tuna Netra, yaitu seseorang yang mengalami keterbatasan dalam mobilitas atau gerakan akibat hilangnya atau menurunnya fungsi penglihatan, yang bisa terjadi karena kelahiran, kecelakaan, atau penyakit (Idaini, 2021).
4. Tuna Laras, menggambarkan individu yang menghadapi masalah emosional, termasuk perilaku merusak diri sendiri, agresi terhadap orang lain, dan lain-lain (Meilanda, 2020).
5. Tuna Grahita, adalah individu yang memiliki perkembangan mental (Intelligence Quotient, IQ) yang tidak sesuai dengan usia biologis mereka (Awalliah et al., 2023).

Penyandang disabilitas di dalam masyarakat seringkali menghadapi berbagai kendala. Kendala ini dapat dipahami sebagai segala jenis struktur fisik ataupun mental yang menghambat kemampuan penyandang disabilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka atau berpartisipasi secara aktif dan setara dalam kehidupan masyarakat. Beberapa kendala yang umum dialami oleh penyandang disabilitas antara lain:

1. Kebijakan dan Standar yang Tidak Memadai: Hal ini berarti bahwa para pemangku kepentingan seringkali gagal memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas dalam pembuatan kebijakan, mengabaikan beberapa hak mereka. Pembuat kebijakan sering menggunakan perspektif yang tidak inklusif, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak selalu mendukung kebutuhan dan keinginan kelompok penyandang disabilitas (Heryani, 2023).
2. Sikap Negatif: Masyarakat yang kurang teredukasi tentang hak-hak penyandang disabilitas seringkali menunjukkan sikap negatif, yang dapat berdampak negatif di berbagai bidang seperti pendidikan dan kesehatan (Fathimah & Apsari, 2028).
3. Kurangnya Penyediaan Layanan: Kebijakan yang tidak inklusif membuat penyandang disabilitas kesulitan mengakses fasilitas layanan publik, terutama layanan kesehatan, rehabilitasi, serta dukungan dan asistensi.
4. Masalah dalam Penyampaian Layanan: Disebabkan oleh kurangnya koordinasi, staf yang tidak memadai, dan kompetensi yang kurang.
5. Pendanaan yang Tidak Memadai: Adanya kekurangan sumber dana untuk mengimplementasikan kebijakan atau gerakan tertentu. Penyandang disabilitas seringkali tidak dijadikan prioritas karena dianggap sebagai kelompok marjinal (Triani et al., 2020).
6. Kurangnya Aksesibilitas: Bangunan dan fasilitas publik seringkali tidak memenuhi kriteria inklusif yang memudahkan akses untuk semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Ini juga berlaku untuk sistem transportasi dan informasi yang tidak mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga fasilitas tersebut menjadi tidak mudah diakses (Trifira et al., 2022).
7. Kurangnya Konsultasi dan Keterlibatan: Penyandang disabilitas jarang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
8. Kurangnya Data dan Bukti: Kekurangan data terkait disabilitas dan bukti keefektifan program menghambat pengembangan program aksi yang lebih baik di masa depan (Susridawati & Ali, 2023).

METODE

Penelitian ini mengimplementasikan program pengabdian kepada masyarakat dengan untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi bagi penyandang disabilitas, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti pemetaan kebutuhan aksesibilitas, pengembangan solusi teknologi, modifikasi infrastruktur fisik, dan edukasi serta peningkatan kesadaran masyarakat. Program ini dilaksanakan dengan melibatkan kolaborasi antara penyandang disabilitas, pengelola transportasi, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas, untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih inklusif. Pemilihan lokasi dan target audiens dilakukan berdasarkan kebutuhan untuk menciptakan dampak yang signifikan dalam upaya meningkatkan inklusivitas di sektor transportasi. Sasaran kegiatan melibatkan penyandang disabilitas sebagai peserta utama, bersama dengan dukungan dari pengelola transportasi, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum sebagai fasilitator. Proses kolaboratif ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas tetapi juga memberdayakan penyandang disabilitas untuk menjadi bagian aktif dalam perencanaan dan implementasi solusi aksesibilitas. Selama pelaksanaan program, digunakan berbagai metode, seperti survei, workshop, dan kampanye publik, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung inklusivitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan transportasi umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Kebutuhan Aksesibilitas Transportasi Penyandang Disabilitas

Mengidentifikasi kebutuhan aksesibilitas transportasi bagi penyandang disabilitas merupakan tahap awal dan krusial dalam memperbaiki sistem transportasi agar lebih inklusif. Proses ini dimulai dengan pemetaan dan analisis kebutuhan yang mendalam, dilakukan melalui pengumpulan data dan observasi langsung terhadap infrastruktur transportasi yang ada. Pemetaan ini fokus pada memahami tantangan-tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, tanpa melibatkan interaksi langsung dengan mereka pada tahap awal ini. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk mendapatkan gambaran objektif tentang kondisi fasilitas transportasi saat ini, seperti halte bus, stasiun kereta, dan terminal, serta untuk mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan aksesibilitas. Selanjutnya, kolaborasi dengan pengelola transportasi umum menjadi sangat penting. Melalui kerjasama ini, informasi tentang kebutuhan peningkatan aksesibilitas dapat disampaikan dan dibahas. Pengelola transportasi memiliki akses dan kendali atas infrastruktur yang bisa dimodifikasi atau ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan aksesibilitas tersebut. Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap usulan peningkatan didasarkan pada analisis kebutuhan yang telah dilakukan sebelumnya, serta memungkinkan untuk penyesuaian yang lebih terarah dan efektif terhadap infrastruktur yang ada.



Gambar 1. Transportasi Kota Ramah Penyandang Disabilitas

Langkah penting selanjutnya adalah evaluasi infrastruktur yang ada. Proses ini melibatkan penilaian komprehensif terhadap kondisi fisik dan fasilitas pendukung di semua titik akses transportasi umum. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara spesifik elemen-elemen infrastruktur yang tidak memenuhi standar aksesibilitas atau yang bisa ditingkatkan untuk mempermudah akses bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, langkah ini merupakan bagian krusial dalam menentukan prioritas dan merencanakan intervensi yang akan dilakukan untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih inklusif. Dalam keseluruhan proses ini, pemetaan dan analisis kebutuhan, kolaborasi dengan pengelola transportasi, serta evaluasi infrastruktur yang ada, semuanya bertujuan untuk membangun fondasi yang kuat bagi perbaikan sistem transportasi. Dengan tidak langsung melibatkan interaksi dengan penyandang disabilitas di tahap awal, fokusnya adalah pada pembuatan *assessment* objektif dan terstruktur terhadap sistem transportasi yang ada. Hal ini memungkinkan untuk identifikasi masalah yang lebih teknis dan detail, yang kemudian bisa ditindaklanjuti dengan solusi yang terukur dan berdampak langsung terhadap peningkatan aksesibilitas.

Pengembangan dan Implementasi Solusi Teknologi

Dalam rangka meningkatkan inklusivitas dan aksesibilitas transportasi bagi penyandang disabilitas, pengembangan dan implementasi solusi teknologi menjadi salah satu langkah strategis yang menjanjikan. Teknologi, khususnya dalam bentuk aplikasi navigasi ramah disabilitas, menawarkan peluang besar untuk memperluas akses dan kemandirian penyandang disabilitas dalam bertransportasi. Aplikasi semacam ini dirancang tidak hanya untuk memberikan informasi rute transportasi umum yang lebih aksesibel tetapi juga untuk menyediakan data penting lainnya seperti lokasi fasilitas pendukung, termasuk toilet yang ramah disabilitas, akses tanpa

tangga, dan area parkir khusus. Pengembangan aplikasi ini melibatkan serangkaian proses teknis yang rumit, mulai dari pengumpulan dan analisis data, hingga desain antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah diakses untuk semua jenis pengguna.

Selanjutnya, agar teknologi ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh target penggunanya, penyelenggaraan pelatihan penggunaan teknologi menjadi krusial. Workshop atau sesi pelatihan ini tidak hanya fokus pada bagaimana menggunakan aplikasi tersebut tetapi juga pada memperkenalkan berbagai fitur yang mungkin tidak langsung jelas bagi pengguna baru. Pelatihan ini bertujuan untuk membangun kepercayaan diri di antara penyandang disabilitas dalam menggunakan teknologi baru dan memotivasi mereka untuk lebih mandiri dalam bertransportasi. Pendekatan ini membantu menjamin bahwa investasi dalam teknologi benar-benar memberikan manfaat praktis bagi mereka yang membutuhkannya.



Gambar 2. Angkutan Umum Untuk Penyandang Disabilitas

Proses pengembangan solusi teknologi tidak berhenti setelah aplikasi diluncurkan. Umpan balik dari pengguna sangat penting untuk iterasi dan peningkatan berkelanjutan dari aplikasi. Menerima dan menindaklanjuti umpan balik ini menunjukkan komitmen terhadap penyediaan solusi yang benar-benar berguna dan responsif terhadap kebutuhan nyata pengguna. Dengan melibatkan pengguna dalam proses pengembangan, baik melalui umpan balik langsung atau melalui uji coba pengguna, pengembang dapat mengidentifikasi masalah usability, fitur yang kurang, atau aspek lain dari aplikasi yang mungkin memerlukan penyempurnaan. Proses iteratif ini memastikan bahwa aplikasi terus berkembang dan tetap relevan dengan kebutuhan penggunanya.

Pengembangan dan implementasi solusi teknologi dalam konteks ini menunjukkan bagaimana inovasi dapat digunakan untuk membuka lebih banyak peluang bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi secara lebih luas. Ini menekankan pentingnya desain inklusif dan pendekatan berpusat pada pengguna dalam teknologi, di mana keberhasilannya tidak hanya diukur dari segi teknis tetapi juga dari dampak sosial yang dihasilkannya. Dengan cara ini, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat, tetapi juga sebagai jembatan menuju masyarakat yang lebih inklusif dan aksesibel bagi semua.

Modifikasi dan Penyempurnaan Infrastruktur Fisik

Dalam upaya menuju inklusivitas yang lebih besar dalam sistem transportasi, modifikasi dan penyempurnaan infrastruktur fisik menjadi komponen kunci yang tidak dapat diabaikan. Keberhasilan dalam menjadikan transportasi umum lebih aksesibel bagi penyandang disabilitas sangat bergantung pada kemampuan untuk mengidentifikasi, merencanakan, dan melaksanakan proyek perbaikan fasilitas yang kritis. Ini meliputi, namun tidak terbatas pada, instalasi ramp yang memenuhi standar, lift di stasiun-stasiun dan halte bus yang ramah disabilitas yang dapat dengan mudah dipahami oleh semua pengguna, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan penglihatan atau kognitif.

Menginisiasi proyek-proyek ini memerlukan komitmen yang kuat baik dari pemerintah lokal maupun nasional, serta dari pengelola transportasi umum. Dalam hal ini, advokasi kebijakan memainkan peran penting. Organisasi penyandang disabilitas, bersama dengan kelompok masyarakat sipil lainnya, berupaya keras untuk berkomunikasi dengan pembuat kebijakan tentang pentingnya alokasi anggaran yang memadai dan sumber daya untuk peningkatan infrastruktur. Mereka menyoroti tidak hanya kewajiban moral dan etis untuk menyediakan akses yang setara bagi semua warga, tetapi juga manfaat sosial dan ekonomi yang lebih luas yang datang dengan sistem transportasi yang inklusif. Mendorong perubahan ini sering kali memerlukan kombinasi dari penekanan pada hak asasi manusia, analisis biaya-manfaat, dan demonstrasi dari praktek terbaik internasional dalam desain infrastruktur ramah disabilitas.



Gambar 3. Infrastruktur Ramah Penyandang Disabilitas

Setelah proyek disetujui dan pendanaan diamanatkan, pengawasan dan manajemen proyek menjadi sangat krusial. Proses ini melibatkan pemantauan ketat terhadap kemajuan pekerjaan untuk memastikan bahwa semua modifikasi dan penambahan fasilitas dilaksanakan sesuai dengan standar aksesibilitas yang telah ditetapkan. Penting untuk memiliki tim proyek yang kompeten dan berpengalaman yang tidak hanya memahami aspek teknis dari konstruksi dan modifikasi infrastruktur tetapi juga prinsip-prinsip aksesibilitas universal. Pada tahap ini, keterlibatan dan umpan balik dari komunitas penyandang disabilitas juga sangat berharga, karena mereka dapat

menawarkan perspektif unik dan praktis tentang bagaimana desain infrastruktur dapat mempengaruhi penggunaan sehari-hari mereka.

Dalam perjalanan menuju inklusivitas transportasi, modifikasi dan penyempurnaan infrastruktur fisik merupakan langkah yang kompleks namun sangat penting. Ini membutuhkan kerjasama lintas sektor, komitmen politik, dan advokasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa kebutuhan penyandang disabilitas tidak hanya diakui tetapi juga diatasi secara praktis dan efektif. Melalui pendekatan yang holistik dan partisipatif ini, kita dapat bergerak lebih dekat ke arah menciptakan sistem transportasi yang benar-benar inklusif, di mana setiap individu, tanpa memandang kemampuan fisik, dapat menikmati hak yang sama untuk bergerak bebas dan aman dalam masyarakat.

Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

Edukasi dan kesadaran masyarakat merupakan pilar penting dalam usaha meningkatkan inklusivitas transportasi untuk penyandang disabilitas. Tanpa pemahaman dan dukungan yang luas dari masyarakat umum, termasuk para staf dan operator transportasi, upaya teknis dan infrastrukural mungkin tidak mencapai dampak maksimalnya. Untuk alasan ini, kampanye kesadaran yang dirancang dengan baik dan pelaksanaannya menjadi sangat penting. Kampanye ini bertujuan untuk menginformasikan masyarakat tentang tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam menggunakan transportasi umum. Mereka menekankan pentingnya aksesibilitas dan inklusivitas sebagai bagian dari hak asasi manusia yang lebih luas dan mengajak masyarakat untuk berkontribusi pada solusi yang inklusif.

Mengadakan sesi pelatihan bagi staf dan operator transportasi umum merupakan langkah berikutnya yang krusial. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kebutuhan spesifik penyandang disabilitas serta teknik dan pendekatan terbaik untuk melayani mereka dengan lebih sensitif dan efektif. Ini tidak hanya meliputi aspek teknis seperti penggunaan peralatan aksesibilitas tetapi juga soft skills seperti komunikasi yang inklusif dan pemberian bantuan yang sesuai. Melalui pelatihan ini, staf dan operator menjadi lebih siap untuk memenuhi kebutuhan semua penumpang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, sensorik, atau kognitif.



Gambar 4. Edukasi Penyandang Disabilitas oleh Kemenhub

Selanjutnya, pembangunan jaringan dukungan antara penyandang disabilitas, masyarakat umum, dan penyedia layanan transportasi memegang peranan penting dalam menciptakan sistem transportasi yang benar-benar inklusif. Jaringan ini memungkinkan untuk pertukaran informasi dan pengalaman yang berharga, memperkuat pemahaman bersama dan kerjasama. Dengan adanya jaringan dukungan ini, penyandang disabilitas merasa lebih dihargai dan didengar, sementara penyedia layanan transportasi dan masyarakat umum mendapatkan wawasan langsung tentang bagaimana meningkatkan layanan mereka. Jaringan dukungan juga memfasilitasi identifikasi dan penanganan masalah secara lebih cepat, mengingat kebutuhan penyandang disabilitas dapat sangat beragam dan kompleks.

Melalui kombinasi kampanye kesadaran, pelatihan untuk staf transportasi, dan pembentukan jaringan dukungan, dapat dibangun fondasi yang kuat untuk inklusivitas dalam sistem transportasi. Edukasi dan kesadaran masyarakat tidak hanya tentang menyebarkan informasi tetapi juga tentang mengubah sikap dan perilaku. Dalam jangka panjang, upaya ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan empatik, dimana setiap individu, tanpa memandang keterbatasan fisik atau kognitif, dapat menikmati mobilitas yang sama dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Peningkatan Keterlibatan Komunitas Penyandang Disabilitas

Peningkatan keterlibatan komunitas penyandang disabilitas dalam aksesibilitas transportasi merupakan salah satu langkah strategis yang dapat membawa perubahan signifikan terhadap inklusivitas dan kenyamanan dalam penggunaan layanan transportasi umum. Melalui pendekatan yang terintegrasi dan partisipatif, berbagai inisiatif telah diluncurkan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Salah satu upaya yang mendapatkan momentum adalah penyelenggaraan forum dialog reguler, yang menjadi wadah komunikasi antara komunitas penyandang disabilitas dan pengelola transportasi. Forum ini tidak hanya berfungsi sebagai platform untuk berbagi tantangan dan pengalaman, tetapi juga

sebagai sarana untuk mengidentifikasi solusi praktis yang dapat diimplementasikan. Dengan demikian, dialog ini membantu memastikan bahwa suara penyandang disabilitas didengar dan dipertimbangkan dalam perencanaan dan pengembangan infrastruktur transportasi.

Selain itu, penunjukan duta aksesibilitas dari kalangan penyandang disabilitas sendiri telah terbukti menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai aksesibilitas. Duta aksesibilitas ini bertindak sebagai jembatan komunikasi antara komunitas penyandang disabilitas dan masyarakat luas, termasuk pengelola transportasi. Mereka bertugas menyebarkan informasi, berbagi kisah inspiratif, dan mengadvokasi hak-hak penyandang disabilitas. Dengan kehadiran duta aksesibilitas, pesan tentang pentingnya aksesibilitas transportasi dapat disampaikan lebih luas dan efektif, sekaligus mendorong lebih banyak penyandang disabilitas untuk aktif berpartisipasi dalam aktivitas sosial dan ekonomi.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi juga menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan aksesibilitas. Melalui program-program edukatif yang ditujukan kepada komunitas lokal, sekolah, dan tempat kerja, kesadaran akan kebutuhan dan hak penyandang disabilitas dalam menggunakan transportasi umum ditingkatkan. Program ini tidak hanya fokus pada penyandang disabilitas sebagai penerima informasi, tetapi juga pada masyarakat umum, termasuk para pengguna transportasi lainnya dan penyedia layanan transportasi. Edukasi yang inklusif dan komprehensif ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan ramah terhadap penyandang disabilitas, memudahkan mereka dalam mengakses berbagai layanan transportasi.

Selanjutnya, pemanfaatan teknologi melalui inisiatif crowd-sourced menjadi langkah inovatif dalam mengumpulkan dan membagikan informasi aksesibilitas. Dengan menggunakan aplikasi atau media sosial, penyandang disabilitas dapat berkontribusi dalam pembuatan basis data aksesibilitas transportasi, berbagi pengalaman, serta memberikan rekomendasi dan umpan balik. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan ketersediaan informasi yang relevan dan akurat mengenai aksesibilitas transportasi tetapi juga mendorong keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam proses pembuatan kebijakan dan pengembangan layanan. Teknologi, dalam konteks ini, menjadi alat pemberdayaan yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara lebih luas dan efektif dalam masyarakat.

Melalui kombinasi dari forum dialog, peran duta aksesibilitas, kegiatan sosialisasi dan edukasi, serta pemanfaatan teknologi crowd-sourced, tercipta ekosistem yang mendukung peningkatan aksesibilitas transportasi bagi penyandang disabilitas. Upaya-upaya ini tidak hanya membantu mengatasi hambatan fisik yang dihadapi penyandang disabilitas tetapi juga mengurangi stigma dan diskriminasi sosial yang sering mereka alami. Dengan demikian, keterlibatan aktif komunitas penyandang disabilitas dalam proses perencanaan, pengembangan, dan evaluasi layanan transportasi umum menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem transportasi yang benar-benar inklusif dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Sinergi dan Kerjasama Antar Lembaga

Dalam upaya meningkatkan aksesibilitas transportasi bagi penyandang disabilitas, sinergi dan kerjasama antarlembaga menjadi fondasi yang kuat untuk menciptakan

perubahan yang berkelanjutan dan efektif. Pengembangan standar aksesibilitas yang konsisten dan inklusif membutuhkan kolaborasi yang erat antara berbagai pihak, termasuk organisasi penyandang disabilitas, pemerintah, pengelola transportasi umum, institusi pendidikan, serta sektor swasta. Pembentukan koalisi aksesibilitas menjadi langkah awal yang krusial dalam membangun platform bersama untuk pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam meningkatkan aksesibilitas transportasi. Koalisi ini berfungsi sebagai wadah untuk menyatukan visi dan usaha dalam mempromosikan standar aksesibilitas yang tidak hanya memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas tetapi juga memastikan inklusivitas dan kesetaraan dalam penggunaan layanan transportasi.

Kolaborasi dengan institusi pendidikan merupakan strategi penting lainnya. Kerjasama ini berorientasi pada pengintegrasian kurikulum yang mencakup aksesibilitas dan inklusivitas ke dalam program studi terkait transportasi dan perencanaan kota. Pendekatan ini tidak hanya menyiapkan calon profesional di bidang terkait dengan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya aksesibilitas tetapi juga menanamkan nilai-nilai inklusivitas sejak dini. Melalui pendidikan yang berfokus pada aksesibilitas, generasi mendatang dari perencana kota, pengelola transportasi, dan pembuat kebijakan akan lebih siap dalam merancang dan mengimplementasikan solusi transportasi yang mempertimbangkan kebutuhan seluruh pengguna, termasuk penyandang disabilitas.

Program kemitraan dengan sektor swasta, khususnya perusahaan teknologi dan startup, membuka peluang besar untuk pengembangan solusi inovatif yang mendukung aksesibilitas. Teknologi, dengan segala kemajuan dan potensinya, menawarkan berbagai kemungkinan untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas, termasuk dalam aspek mobilitas dan aksesibilitas transportasi. Melalui kemitraan ini, dapat dikembangkan aplikasi, platform, dan alat bantu yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan aksesibilitas, memudahkan penyandang disabilitas dalam mengakses informasi transportasi, navigasi, dan komunikasi. Kolaborasi ini juga mendorong inovasi dan penerapan teknologi terbaru yang tidak hanya bermanfaat bagi penyandang disabilitas tetapi juga meningkatkan efisiensi dan kenyamanan transportasi umum secara keseluruhan.

Pengembangan dan penyebaran standar aksesibilitas yang dapat diadopsi oleh seluruh operator transportasi merupakan titik krusial dalam menciptakan lingkungan transportasi yang inklusif. Kerjasama dengan lembaga standarisasi memungkinkan penetapan kriteria dan pedoman yang jelas, memastikan bahwa setiap elemen dalam sistem transportasi, mulai dari desain infrastruktur hingga layanan pelanggan, dirancang untuk dapat diakses oleh semua orang, tanpa terkecuali. Standar aksesibilitas yang konsisten dan universal ini tidak hanya memfasilitasi mobilitas penyandang disabilitas tetapi juga memperkuat komitmen terhadap inklusivitas sosial dan kesetaraan hak bagi setiap individu.

Melalui sinergi dan kerjasama antarlembaga ini, dapat tercipta ekosistem transportasi yang benar-benar mendukung kebutuhan semua pengguna, termasuk penyandang disabilitas. Kolaborasi erat antar pihak, pengintegrasian aksesibilitas ke dalam pendidikan dan inovasi teknologi, serta pengembangan standar aksesibilitas yang konsisten, merupakan langkah-langkah konkret menuju pencapaian transportasi umum yang inklusif. Inisiatif ini tidak hanya memperkuat hak mobilitas bagi

penyandang disabilitas tetapi juga menunjukkan komitmen kolektif masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi semua.

KESIMPULAN

Dari serangkaian pembahasan yang telah diuraikan, terlihat jelas bahwa meningkatkan aksesibilitas transportasi bagi penyandang disabilitas memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Identifikasi kebutuhan aksesibilitas yang spesifik, pengembangan dan implementasi solusi teknologi, modifikasi dan penyempurnaan infrastruktur fisik, serta edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat, semuanya merupakan komponen kritis yang saling terkait dalam menciptakan sistem transportasi yang benar-benar inklusif. Setiap aspek tersebut berkontribusi tidak hanya dalam mengurangi hambatan fisik tetapi juga dalam membangun pemahaman dan empati di kalangan masyarakat luas, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi penyandang disabilitas. Keberhasilan dalam menciptakan aksesibilitas transportasi yang inklusif tergantung pada kemauan dan kerja sama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, pengelola transportasi, komunitas penyandang disabilitas, dan masyarakat umum. Inisiatif-inisiatif yang telah dibahas menunjukkan jalan menuju inklusivitas yang tidak hanya menguntungkan penyandang disabilitas tetapi juga meningkatkan kualitas sistem transportasi untuk semua pengguna. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus mendorong dialog, inovasi, dan aksi kolektif demi mewujudkan visi transportasi yang aksesibel, aman, dan nyaman bagi semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z., Apripari, A., Muhtar, M. H., Ahmad, A., Bakung, D. A., & Imran, S. Y. (2023). Pendekatan Cultural Studies Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Boalemo. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(6), 11518-11526.
- Afkari, F., & Maulana, D. F. (2021). Urgensi Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada Perbankan Berbasis Inklusi Keuangan. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 20(3), 217-232.
- Almira, A., & Aviandy, M. (2022). Representasi Difabel di Rusia Dalam Film Corrections Class (Klass Korrektsii) Karya Ivan Tverdovsky. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 6(1), 49-68.
- Awalliah, S. H., Patras, Y. E., & Suchyadi, Y. (2023). Upaya Guru Kelas dalam Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Menggunakan Media Gambar pada Anak Tunagrahita. *Jurnal PGSD: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 16(2), 113-117.
- Fathimah, K., & Apsari, N. C. (2020). Aksesibilitas Sebagai Bentuk Kemandirian Disabilitas Fisik Dalam Mengakses Fasilitas Pelayanan Publik Ditinjau Dari Activity Daily Living. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(2), 120-132.
- Haholongan, M. R., & Subroto, M. (2021). Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Khusus terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas dalam Pemenuhan HAM di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 6131-6137.

- Harimurti, M., & Roychansyah, M. S. (2022). Hubungan Kepadatan Dengan Jumlah Kasus Covid-19: Studi Terhadap 39 Kota Kompak. *Jurnal Riset Pembangunan*, 4(2), 86-95.
- Herrindra, R. P., Setiawan, S., & Wijaya, A. P. (2023). Desain Sepeda Motor Listrik untuk Aktivitas City Touring bagi Penggemar Sepeda Motor Bergaya Neo-Klasik. *Jurnal Desain Indonesia*, 5(01), 73-102.
- Heryani, R. (2023). Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Lanjut Usia Dalam Hukum Positif Indonesia. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 642-656.
- Idaini, M. W. (2021). Interaksi Sosial Kaum Difable Netra. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(02), 242-256.
- Khotimah, N. I. H. H. (2023). Pengendalian hipertensi dengan cerdik pada masyarakat Kelurahan Rancanumpang. *Abdimas Siliwangi*, 6(3), 751-770.
- Maślanka, K., Zielinska, N., Karauda, P., Balcerzak, A., Georgiev, G., Borowski, A., ... & Olewnik, Ł. (2023). Congenital, acquired, and trauma-related risk factors for thoracic outlet syndrome—review of the literature. *Journal of Clinical Medicine*, 12(21), 6811.
- Meilanda, A. Y. (2020). Bahaya Labeling Negatif Terhadap Pembentukan Konsep Diri Pada Anak Tunalaras Dengan Tipe Gangguan Perilaku (Conduct Disorder) Dalam Perspektif Konseling Lintas Budaya. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Borneo*, 2(1).
- Muhaimin, M., & Ishaq, Z. (2023). Manajemen Keluarga Sakinah pada Pasangan Suami Istri Difabel (Penelitian pada Masyarakat Penyandang Difabel di Desa Kacangan Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan). *JOSH: Journal of Sharia*, 2(01), 68-85.
- Patel, D. R., Cabral, M. D., Ho, A., & Merrick, J. (2020). A clinical primer on intellectual disability. *Translational pediatrics*, 9(Suppl 1), S23.
- Propiona, J. K. (2021). Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10.
- Putra, N. A., & Putra, R. E. (2024). Inovasi Aplikasi Info PBBP2 Untuk Meningkatkan Realisasi Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan di Kabupaten Agam. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 1(4), 714-732.
- Rahayu, N. N. S., & Swari, L. G. N. (2020). Kajian Perkembangan Sistem Petanda Pada Arsitektur Dan Interior Ruang Publik di Denpasar Menuju Denpasar Kota Kreatif. *Jurnal Arsitektur ZONASI*, 3(3), 318-334.
- Rakhmatulloh, A. R., Intan, D., & Dewi, K. (2022). Integrasi Antar Transportasi Umum di Kota Semarang. *Jurnal Pengembangan Kota*, 10(1), 36-46.
- Rosantiningsih, I., & Yola, L. (2023). Kajian Hak Warga Kampung Pojok Jakarta Akan Akses Transportasi. *Estoria: Journal of Social Science and Humanities*, 4(1), 544-560.
- Sawir, M., Anirwan, A., Susilawaty, S., & Maradona, Z. A. (2023). Evaluasi Program RESPEK dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 5(2), 140-154.

- Sodiqin, A. (2021). Ambiguitas perlindungan hukum penyandang disabilitas dalam perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 31.
- Susridawati, R., & Ali, H. (2023). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menurunkan Angka Stunting pada Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Suliki dan Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Mirai Management*, 8(2).
- Triani, Y., Panorama, M., & Sumantri, R. (2020). Analisis Pengentasan Kemiskinan di Kota Palembang. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 158-176.
- Trifira, S., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2022). Kualitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru. *Journal of Social and Policy Issues*, 108-112.